

Model-Model Pembangunan dan Kenyataan Kebijakan Ekonomi*

Djisman S. SIMANDJUNTA

TUGAS-TUGAS KEBIJAKAN EKONOMI

Sebagai bagian dari upaya-upaya perbaikan kesejahteraan, bangsa-bangsa termasuk Indonesia meletakkan berbagai tugas bagi kebijakan ekonomi yang diarahkan pada stabilitas nilai uang seperti tercermin dalam tingkat kenaikan harga-harga dan perubahan nilai tukar terhadap uang asing, pertumbuhan ekonomi yang "cukup tinggi," kesibukan penuh dari tenaga kerja, pembagian pendapatan yang adil dan keseimbangan neraca pembayaran. Tentu saja tugas-tugas tersebut dapat dikurangi atau ditambah, tergantung dari ekonomi yang diperhatikan menurut ruang dan waktu. Tetapi bagi ekonomi yang sedang berkembang dan terbuka, pemenuhan "Pancakrida" tersebut di atas kiranya baru akan memungkinkan kebijakan ekonomi untuk menyumbang pada perbaikan kesejahteraan.

Adalah tidak mustahil bagi kebijakan ekonomi untuk memenuhi "Pancakrida" ini. Suatu ekonomi seperti ekonomi Jepang dewasa ini dapat menikmati sekaligus tingkat inflasi yang rendah, tingkat pertumbuhan yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, pemerataan pendapatan yang "cukup baik" dan keseimbangan neraca pembayaran yang praktis ditafsir sebagai neraca pertukaran barang dan jasa yang bersaldo positif. Tetapi dalam kebanyakan hal, pemenuhan "Pancakrida" ini dengan serentak adalah sangat susah. Krida stabilisasi nilai uang dapat bertabrakan dengan krida pertumbuhan. Krida pertumbuhan pada pihak lain dapat bertabrakan dengan krida pemerataan dan keseimbangan neraca pembayaran di lain pihak. Dengan demikian, Pancakrida ini adalah magis bagi kebanyakan ekonomi dan keberhasilan memenuhinya dengan serentak disebut keajaiban. Tidak mengherankan

*Disajikan pertama kali dalam Seminar STF Driyarkara Kelompok Studi Proklamasi di Jakarta, 30 November 1985.

bahwa, di samping gelombang perniagaan (trade cycle), ada juga gelombang kebijakan ekonomi tergantung dari pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi sebagaimana ditafsir oleh mereka yang memegang kekuasaan. Seandainya pun pertanyaan yang dihadapi adalah sama -- dalam kenyataan setiap bangsa menghadapi pertanyaan yang paling sedikit sebagian adalah khas -- kebijakan ekonomi bangsa-bangsa dapat sangat berbeda, begitu juga model yang mendasarinya dan diperlukan untuk menjelaskan, meramal dan mengendalikan dunia riil.¹ Bahkan dalam satu sistem yang sama pun dapat terjadi perubahan tafsir yang disusul oleh perubahan model pembangunan secepat perubahan pemahaman alam ketika determinisme Newton digeser oleh relativisme Einstein. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa yang berkesinambungan dalam model-model pembangunan adalah eksperimentasi, sementara yang dianggap sebagai yang pokok di antara elemen-elemen gejala yang dihadapi berubah dari waktu ke waktu dan atau menurut ruang. Tugas-tugas yang dipercayakan pada kebijakan ekonomi adalah terlalu besar untuk dapat ditumpukan pada satu model yang "final."

DEIDEOLOGISASI MODEL PEMBANGUNAN

Meskipun "polyteisme" ekonomi dalam arti bahwa ajaran tersendiri diperlukan untuk penjelasan, peramalan dan pengendalian kenyataan ekonomi negara-negara sedang berkembang adalah sesuatu yang baru, idealisasi atau permodelan ekonomi sudah mempunyai sejarah yang panjang, seiring dengan peningkatan kompleksitas sistem ekonomi yang menurut Marx bermula dari pembagian kerja. Menyusul Revolusi Prancis dengan semboyan kebebasan, kesamaan dan persaudaraan, Claude-Henri de Saint-Simon tampil dengan yang disebut "classe industrielle," Francois-Marie-Charles Fourier dengan "phalantere," Pierre-Joseph Proudhon dengan "classe moyenne" dan Robert Owen dengan "New Moral World." Masing-masing pelopor ini yang oleh Marx disebut sebagai utopis, memusatkan perhatian dari elemen pokok tertentu dari gejala yang mereka hadapi dan sesuai itu mengusulkan rancangan baru, lengkap dengan modelnya. Proses idealisasi ini berlanjut dalam paruhan kedua abad ke-19. Walaupun Marx tampil sebagai tokoh yang dominan, pelopor-pelopor lain seperti yang bergabung dalam "Fabian Society" yang terkenal karena gradualisme dan model "Sosialisme Gas dan Air"-nya tidak dapat diremehkan.²

¹Model dapat bersifat verbal/logikal, fisikal, geometris, atau aljabar. Sebagai hasil idealisasi ia diperlukan karena pengamatan dunia nyata tidak menghasilkan kesimpulan. Tetapi di lain pihak ia harus realistis dalam arti mengandung elemen-elemen pokok dari gejala yang diamati. Lihat Michael D. Intriligator, *Econometric Models, Techniques, & Applications* (New Jersey: Englewood Cliffs, 1978), hal. 14-22.

²Tentang gagasan-gagasan sosialisme ini lihat "Sozialismus," dalam *Handwoerterbuch der Wirtschaftswissenschaft*, Stuttgart 1978.

Meloncat ke dasawarsa kedua abad ini, Lenin yang berhadapan dengan "Komunisme Perang" yang antara lain ditandai oleh ancaman kebangkrutan ekonomi mengumumkan "Kebijakan Ekonomi Baru" yang mengandung restorasi ekemen-elemen kapitalistis. Sementara ekonomi bangkit kembali, pertikaian memuncak antara Trotzky dan Bucharin sebelum Stalin mengumumkan apa yang kemudian dikenal sebagai model Stalin yang berpaling dari Kebijakan Ekonomi Baru.³ Menyusul kemenangan Stalin dalam Perang Dunia II, bangsa-bangsa lain Eropa Timur pun menjiplak model yang sama. Tetapi tidak lama kemudian ternyata bahwa model Stalin dapat dikatakan mati muda di luar Uni Soviet. Bersamaan dengan pendepakan Yugoslavia dari rumpun komunisme internasional, Tito mengumumkan model atau jalan Yugoslavia yang dikenal "workers' self-management."⁴ Dalam tahun 1968, Hongaria pun mengumumkan Kebijakan Ekonomi Baru yang berpaling dari model Stalin ke model Ekonomi Pasar.⁵ Republik Rakyat Cina pun yang menderita di bawah Revolusi Kebudayaan mengumumkan "empat modernisasi" pada pertengahan tahun 1970-an dan sementara itu sudah memperkenalkan banyak langkah-langkah reformasi yang sebelumnya dianggap tabu.⁶ Tetapi ini pun akan terbukti sebagai sesuatu yang bukan final.

Perubahan-perubahan juga terjadi dalam ekonomi-ekonomi kapitalisme. Berhadapan dengan gejala-gejala depresi besar, Roosevelt dengan dukungan kaum kapitalis seperti Joseph Kennedy, mengumumkan "New Deal" yang lazim dianggap sebagai penyelamat kapitalisme. Segera sesudah itu, *The General Theory* dari John Maynard Keynes terbit yang melihat ekonomi dari sisi lain dibanding sebelumnya, dan memberi ruang gerak yang bersifat anti-siklis bagi pemerintah.⁷ Walaupun perubahan ini tidak membuahkan ekonomi yang ideal dan oleh banyak orang disepelekan sebagai polesan kosmetis

³Lihat misalnya Djisman S. Simandjuntak "Refleksi dalam Sistem Ekonomi," dalam *Eksekutif*, No. 60 (Juni 1984), hal. 24-27.

⁴Tentang ini lihat "Yugoslawien 1918-1968," dalam *Handbuch der Europaischen Geschichte*, Vol. 7, Buku 2, hal. 1183-1240.

⁵Tentang ini lihat "Ungarn seit 1918: Vom Ende des I. Weltkriegs bis zur Aera Kadar," dalam *Handbuch der Europaischen Geschichte*, Vol. 7, Buku 2, hal. 883-919. Lihat juga Djisman S. Simandjuntak, "Synthese Rencana dan Pasar; Ekonomi Hongaria," dalam *Analisa*, Tahun 13, No. 12 (Desember 1984), hal. 933-937.

⁶Tentang reformasi ekonomi Cina lihat An-Chia Wu, "Economic Restructuring in Mainland China: A Political Perspective," dalam *Issues and Studies*, Vol. 20, No. 2 (1984), hal. 10-24. Lihat juga Clyde D. Stoltenberg, "China's Special Economic Zones: Their Developments and Prospects," dalam *Asian Survey*, Vol. 24, No. 6 (1984), hal. 637-654.

⁷Ekonomi Keynes lahir sebagai hasil krisis ekonomi Say, tetapi kemudian juga terjerumus ke dalam krisis yang disebut sebagai krisis kedua oleh Joan Robinson. Lihat Joan Robinson, "The Second Crisis of Economic Theory," dalam *The American Economic Review*, Vol. 62, No. 2 (1972), hal. 1-10. Lihat juga Daniel Bell, "Models and Reality in Economic Discourse," dalam Daniel Bell dan Irving Kristol (penyunting), *The Crisis in Economic Theory* (Macmillan 1981), hal. 46-80.

belaka, ia sudah mendorong kelahiran perundang-undangan sosial yang mengangkat derajat manusia dari sekedar barang (ware) yang dipertukarkan menurut kekuatan pasar.⁸ Tetapi sebagaimana terjadi dalam sosialisme, kemunduran sosial dalam kapitalisme pun dapat saja terulang.

Dari yang dikemukakan di atas tampak bahwa ideologi tidak selalu menjadi primat model pembangunan ekonomi. Model Stalin adalah bukan yang final bagi sistem sosialisme, termasuk di Uni Soviet sendiri. Sejak lama ekonom-ekonom Uni Soviet pun sudah menggagaskan desentralisasi perencanaan atau penggunaan mekanisme pasar dan baik Andropov maupun Gorbachev secara berturut-turut sudah melihat urgensi pembaruan fundamental dalam sistem dan model ekonomi Uni Soviet.⁹ Di pihak lain, maksimalisasi laba tidak lagi merupakan primat model-model ekonomi dalam ekonomi yang kapitalistis. Tidak mengada-ada kalau orang berbicara tentang konvergensi. Tangan tersembunyi (the invisible hand) dan tangan nyata (the visible hand) tidak lagi seantagonistis seperti sediakala.

MODEL PEMBANGUNAN NEGARA BERKEMBANG

Sebelum beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pembangunan ekonomi Indonesia, ajaran pembangunan (developmentalism) yang dewasa ini dianggap sedang berada dalam krisis, kalau bukan mati, perlu ditelaah secara singkat.

Sebagaimana disinggung di depan, kesadaran bahwa paradigma atau ajaran ekonomi yang khas diperlukan dalam penjelasan, peramalan, dan pengendalian ekonomi terbelakang atau sedang berkembang, baru tumbuh sesudah Perang Dunia II. Dan barangkali adalah suatu ironi bahwa tempat kelahiran ekonomi pembangunan (development economics) adalah Amerika Serikat, sehingga tidak mengherankan bahwa ajaran tersebut: (i) mengacu dengan kuat pada sejarah pembangunan Amerika Serikat; (ii) melukis suatu masa depan menurut kemajuan yang sudah dicapai Amerika Serikat; dan (iii) melahirkan model-model pembangunan yang pada dasarnya adalah pengembangan model pertumbuhan Harrod-Domar.¹⁰

⁸Tentang perubahan Kapitalisme lihat Calvin B. Hoover, "Capitalism" dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol. 2, Macmillan, hal. 297-301. Tentang ekonomi Jerman Barat sebagai contoh lihat Djsman S. Simandjuntak, "Kerangka Sistem Ekonomi Pasar Sosial Republik Federasi Jerman," dalam *Manajemen*, Tahun ke-4 (Juli-Agustus 1984), hal. 57-61.

⁹Tentang ini lihat Hans Herman Hoehmann, "Sowjetische Wirtschaftsreformen zwischen Markt und Macht," dalam *Europa Archiv*, Vol. 38, No. 24 (1983), hal. 757-764. Lihat juga Marshall I. Goldman, "Gorbachev and Economic Reform," dalam *Foreign Affairs*, Vol. 64 (Fall 1985), hal. 56-73.

¹⁰Stok modal adalah variabel poros dalam model ini dan pertanyaan pertumbuhan pada dasarnya adalah pertanyaan akumulasi modal. Lihat Evsey D. Domar, "Capital Expansion, Rate of Growth, and Employment," dalam *Econometrica*, Vol. XIV (1946), hal. 137-148.

Pembangunan pada dasarnya diartikan sebagai suatu proses transformasi ekonomi dari yang tradisional ke yang modern dan yang dianggap sebagai halangan utama terdapat dalam nilai-nilai tradisional. Ekonomi pun dibagi ke dalam sektor modern dan sektor tradisional, masing-masing dengan tingkat produktivitas yang berbeda jauh dalam arti yang modern dengan produktivitas tinggi dan yang tradisional dengan produktivitas rendah atau bahkan nol. Sesuai itu, terapi yang diusulkan berporos pada ekspansi sektor modern, dan untuk itu penghalang-penghalang transformasi perlu diatasi begitu juga kendala-kendala seperti kendala pembelanjaan investasi dengan menggunakan pembelanjaan ekstern.

Dalam tahun 1950-an dan 1960-an berbagai model dirancang, dan perhatian ekonomi pembangunan pun meluas. Di antara model-model yang paling dulu dapat disebut model ekonomi dengan penawaran buruh tidak terbatas seperti yang dikembangkan oleh Arthur Lewis,¹¹ serta Fei dan Ranis.¹² Mahalanobis dari India pun mengembangkan "model dua sektor" yang bertumpu kuat pada model Harrod-Domar. Ekonomi dibagi dalam sektor barang modal dan sektor barang konsumsi atas dasar perbedaan rasio modal-keluaran antara keduanya. Menurut model ini, yang menentukan bagi pembangunan ekonomi adalah modal yang disediakan bagi sektor barang modal atau industri berat. Sebaliknya, Schumacher menampilkan gagasan yang berlawanan. Dengan mengatakan bahwa akumulasi modal per kepala di negara-negara terbelakang adalah jauh lebih kecil daripada di negara-negara maju seperti Amerika Serikat,¹³ Schumacher mengusulkan teknologi yang sepadan (dengan karunia faktor). Tetapi pada waktu yang sama dia amati bahwa teknologi seperti tidak ada. Selama penelitian dan pengembangan terpusat di negara-negara kaya, selama itu teknologi yang sepadan dengan karunia faktor negara miskin tidak dapat ditemukan.

Masih banyak paradigma lain dalam ekonomi pembangunan. Sebagian seperti Rostow memusatkan perhatian pada tahapan dan kondisi pembangunan, sementara bagian lain berusaha menjejaki sumber-sumber pertumbuhan di samping modal yang dalam model Harrod-Domar diperlakukan sebagai sumber tunggal. Ada juga yang melihat pemenuhan kebutuhan pokok sebagai

¹¹Lihat A.W. Lewis, "Economic Development with Unlimited Supplies of Labour" dalam *Manchester School of Economic and Social Studies*, Vol. 22 (1954), hal. 139-148.

¹²Lihat J.C.H. Fei dan G. Ranis, *Development of the Labour Surplus Economy* (Homewood Illinois 1964).

¹³Kalaupun rasio tabungan terhadap pendapatan di kedua kelompok negara adalah sama, jumlah tabungan absolut berbeda jauh karena perbedaan pendapatan. Pertumbuhan angkatan kerja yang juga jauh berbeda semakin memperbesar kesenjangan modal. Atas dasar per kepala, modal negara terbelakang adalah pecahan kecil dari modal negara maju.

yang menentukan dalam pembangunan ekonomi terutama sesudah McNamara mengundangkannya ketika menjabat sebagai Presiden Bank Dunia.¹⁴

Sejauh mana model-model pembangunan yang dikembangkan dalam tahun 1950-an dan 1960-an berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang, tidak dapat dijawab dengan gamblang, apalagi dengan suatu jawaban yang bersifat umum.¹⁵ Tetapi terlepas dari pengaruh tersebut dapat dikatakan bahwa: (i) model-model tersebut sudah memperkaya alat-alat analisa pembangunan, walaupun alat-alat tersebut -- karena terpusat pada alat-alat ekonomi -- dianggap jauh dari cukup; (ii) model-model tersebut masih terbuka bagi penyempurnaan dengan memasukkan variabel-variabel sosial-politik, walaupun ini akan sangat sulit; (iii) ekonomi pembangunan sedang dilanda kejenuhan seperti dikatakan oleh Hirschman,¹⁶ dan (iv) ajaran dependensi tampak menggeser ekonomi pembangunan dengan mengarahkan kritik pada sifat terpenting ekonomi pembangunan, yaitu integrasi dengan ekonomi dunia melalui perdagangan, lalu lintas modal, dan investasi langsung oleh multinasional.

Dalam relevansi dengan model pembangunan, beberapa hal tentang ajaran dependensi perlu disinggung secara singkat di sini.¹⁷ Berbeda dengan ekonomi pembangunan yang memperlakukan ekonomi yang sedang berkembang sebagai kesatuan yang sederajat dengan ekonomi yang sudah maju dan melokalisasi hambatan pembangunan dalam masing-masing ekonomi, ajaran dependensi memperlakukan ekonomi yang sedang berkembang atau terbelakang sebagai pinggiran (peri-peri atau satelit) kapitalisme dunia dan melokalisasi hambatan pembangunan justru pada integrasi dengan kapitalisme dunia. Andre Gunder Frank yang mewakili sayap ekstrem rumpun dependensi tidak melihat peluang pembangunan bagi ekonomi yang terbelakang dalam dunia yang seperti itu. Pelunakan integrasi memang dianggap dapat membuka peluang seperti itu, tetapi pelunakan tersebut tidak dapat dilakukan karena kaum elit di negara terbelakang justru tergantung dari integrasi dengan kapitalisme dunia. Karena itu, integrasi tidak akan melunak dan perkembangan yang dihasilkannya adalah "perkembangan keterbelakangan."

¹⁴Lebih lanjut lihat *World Development*, Vol. 11, No. 10 (1983), edisi khusus tentang pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan.

¹⁵Sekedar contoh tentang kegagalan model Arthur Lewis lihat Raphael Sebastian, "State-Sector Development in Trinidad and Tobago 1956-1982," dalam *Contemporary Marxism*, No. 10 (1985) hal. 111-112.

¹⁶Lihat Tony Smith, "Requiem or New Agenda for Third World Studies?" dalam *World Politics*, Vol. 37 (1985), hal. 533-544.

¹⁷Salah satu literatur yang penulis anggap baik adalah yang disunting oleh Dudley Seers, *Dependency Theory: A Critical Assessment* (Frances Printer 1981).

Perkembangan yang sungguh-sungguh menurut Gunder Frank hanya dapat berlangsung setelah pemutusan (delinking atau disosiasi) hubungan dari inti (core atau metropolitan) kapitalisme dunia, dan untuk itu diperlukan revolusi bersenjata.¹⁸ Tetapi Gunder Frank mewakili hanya satu sayap dalam ajaran dependensi.

Berbeda dengan Frank, Cardoso dan Valetto mengamati bahwa perkembangan yang sungguh-sungguh (genuine development) sudah terjadi di negara-negara selatan. Basis industri sudah tersedia, ekonomi sudah mengalami diversifikasi, integrasi dan kemajuan.¹⁹ Sebagian bahkan sudah mendapat julukan sebagai Negara Industri Baru, lengkap dengan lapisan wiraswasta dan pemerintahan yang mandiri dan tidak lagi sekedar kaki tangan dari kapitalis-kapitalis di inti. Untuk menghadapi pengaruh-pengaruh buruk dari investasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional, berbagai skema pembatasan sudah dikembangkan oleh negara-negara berkembang, baik berupa skema nasional maupun skema regional seperti dilakukan oleh Pakta Andean melalui Kode Investasi Bersama.²⁰

Berbeda juga dengan Gunder Frank, fraksi lain dalam dependensi, yaitu yang tergabung dalam ECLA (UN Economic Commission for Latin America) yang terkenal dengan thesis Preblich-Singer tentang dasar pertukaran yang terus memburuk, tidak mengusulkan disosiasi, melainkan upaya-upaya diversifikasi seperti pembangunan industri atas dasar substitusi impor. Yang dituju adalah perbaikan dasar pertukaran, walaupun ini terbukti adalah sangat sulit dalam kebanyakan hal.²¹ Samir Amin sendiri, di samping mengatakan bahwa kapitalisme tidak dapat dielakkan, melihat bahwa perdagangan dan spesialisasi atas dasar keunggulan komparatif masih tetap relevan bagi negara berkembang.²²

Dari uraian di atas tampak bahwa ajaran dependensi, mirip dalam hal ini dengan ekonomi pembangunan, tidak terdiri dari ajaran tunggal. Ia adalah

¹⁸Lihat Andre Gunder Frank, *Lumpenbourgeoisie: Lumpendevlopment* (Monthly Review Press, 1972), hal. 145. Lihat juga pengarang yang sama *Capitalist Underdevelopment* (Oxford University Press, 1975), hal. 104-110.

¹⁹Lihat Fernando H. Cardoso dan Enzo Faletto, *Dependency and Development in Latin America* (University of California Press, 1979).

²⁰Tentang ini lihat Richard W. Moxon, "Harmonization of Foreign Investment Laws among Developing Countries: An Interpretation of the Andean Group Experience," dalam: *Journal of Common Market Studies*, Vol. 16 (1977), hal. 22-52.

²¹Pertanyaan-pertanyaan tentang ini diulas dengan baik oleh Samir Amin dalam bukunya *Ungleiche Entwicklung*, terjemahan dari bahasa Perancis oleh Hildegard dan Hartmut Elsenhaus. (Hamburg, 1977).

²²Lihat Samir Amin, "Class and Nation: Historically and in the Current Crisis," (Monthly Review Press: 1980), hal. 146.

kumpulan paradigma-paradigma, dan Gunder Frank dengan gagasan pemutusan hubungan (dissosiasi) tidak dapat dikatakan sebagai wakil mayoritas. Kecenderungan utama kiranya adalah yang diwakili oleh Cardoso yang mengatakan bahwa dalam kapitalisme dunia pun, pinggiran dapat berkembang walaupun perkembangan itu adalah perkembangan yang tergantung (pada inti) atau "dependent development." Bukti-bukti bahwa masing-masing negara berkembang menunjukkan laju dan kemandirian yang berbeda dalam pembangunan juga semakin tidak dapat disepelekan. Rumus dissosiasi, dengan demikian tidak berlaku universal, dan bahkan tidak merupakan *conditio sine qua non* pembangunan. Ada negara yang menjauhi integrasi dengan inti kapitalisme dunia, tetapi tetap terbelakang seperti Birma atau Cina hingga awal 1970-an. Sebaliknya ada negara yang secara kuat terintegrasi dengan inti, tetapi justru merupakan yang lebih maju di antara negara-negara berkembang seperti Korea Selatan dan Brasilia. Karena itu, pertanyaan dapat dialihkan pada apa yang disebut sebagai "dependent development" atau "discriminative integration."

PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Dari deideologisasi pembangunan, model-model ekonomi pembangunan dan diagnosa dependensi dalam pluralismenya masing-masing, Indonesia pun dapat menarik pelajaran yang diperlukan dalam perumusan kebijakan ekonomi dalam tahun-tahun mendatang. Tetapi sebelum itu, lingkungan yang menurut perkiraan akan dihadapi, perlu dipahami.

Dimulai dengan masalah ketenagakerjaan, ekonomi Indonesia dalam tahun-tahun mendatang dihadapkan pada penciptaan lapangan kerja yang berukuran besar. Dengan kenaikan angkatan kerja yang mendekati 3% per tahun dan elastisitas ketenagakerjaan dari Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 0,32 seperti dalam tahun 1970-an, diperlukan pertumbuhan PDB sekitar 7-8% per tahun, sekedar untuk mencegah perburukan neraca ketenagakerjaan.²³ Tentu saja aspek-aspek ketenagakerjaan yang kita hadapi akan berubah. Dengan pengumpamaan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi akan mengalami pergeseran sektoral dan, karena itu menuntut kualitas baru angkatan kerja, diperlukan investasi kemanusiaan yang sangat besar. Itu tidak semata-mata berarti pendidikan, tetapi juga perbaikan kesehatan yang pada gilirannya tergantung dari banyak sekali faktor, termasuk lingkungan hidup.

Besarnya lapangan kerja yang harus disediakan di satu pihak dan keterbatasan sumbangan yang dapat diharapkan dari kenaikan elastisitas ketenaga-

²³Lihat Djisman S. Simandjuntak, "Aspek Ketenagakerjaan Pelita IV," *Sinar Harapan*, 9 April 1984.

kerjaan dari PDB di lain pihak, membuat pertumbuhan ekonomi semakin penting. Tetapi penaikan tingkat pertumbuhan melebihi rata-rata yang dicapai dalam empat tahun yang terakhir dihadapkan pada kendala-kendala yang sulit diatasi. Sektor industri yang diharapkan menjadi penyumbang yang semakin penting bagi pertumbuhan PDB dan penyediaan lapangan kerja, justru berada dalam kelesuan. Industri-industri barang konsumsi yang bersifat substitusi impor dan dalam tahun 1970-an tumbuh dengan cepat di balik perlindungan yang tinggi, kini menghadapi kejenuhan semu dalam arti kejenuhan dengan harga tinggi, sementara investasi restrukturisasi yang diharapkan dapat menurunkan harga dan menaikkan permintaan cenderung terhalang oleh regulasi yang bersifat melindungi peserta-peserta yang sudah ada. Harga tinggi ini pada umumnya disangkutpautkan dengan biaya tinggi yang pada gilirannya sulit dihindari dalam keterbatasan pasar. Tetapi unsur lain kiranya masih ada, yaitu unsur rente yang timbul karena ketertutupan pasar. Mempertanyakan harga-harga tinggi adalah tidak lengkap kalau dibatasi pada efisiensi usaha. Ketertutupan pasar itu juga harus dipertanyakan.²⁴

Dengan kejenuhan semu dalam industri barang konsumsi, adalah wajar kalau orang meletakkan harapan pada industri hulu atau industri yang menghasilkan barang setengah jadi dan bahan baku. Tetapi industri hulu tidak dapat tumbuh melewati pertumbuhan industri hilir, kecuali yang bertumpu pada ekspor. Dengan kejenuhan semu yang melanda industri barang konsumsi, insentif investasi di industri hilir menjadi sangat lemah. Dengan kata lain, industri hulu tampaknya belum dapat diharapkan sebagai "mesin" baru dari pertumbuhan industri dalam waktu dekat.

Bidang lain yang sering disebut sebagai bidang baru adalah industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Dan memang peluang di bidang ini masih terbuka luas, baik yang ditujukan bagi pemenuhan permintaan dalam negeri maupun yang berorientasi ekspor. Namun demikian, daya tarik bidang ini bagi penanaman modal tampaknya belum seimbang dengan risiko yang diperkirakan. Walaupun gagasan dasar PIR sudah mendapat dukungan dari sektor swasta, berbagai pertanyaan belum dapat dijawab. Kiranya harus dipertanyakan apakah dan sejauh mana pola PIR dapat dan perlu dikukuhkan sebagai pola tunggal pengembangan perkebunan, peternakan dan perikanan di Indonesia.

²⁴Pembatasan akses ke pasar melalui perizinan misalnya menciptakan sejenis rente kejarangan (scarcity rent) yang dapat dieksploitasi oleh yang berwenang dalam perizinan dan atau yang mendapat izin. Seorang pemegang izin investasi belum tentu sanggup melakukan investasi atau menganggap bahwa investasi tidak perlu dilakukan karena penjualan izin dapat mendatangkan keuntungan baginya. Sementara itu, yang tidak mendapat izin akan terus berusaha mendapatnya. Serangkaian kegiatan pencarian rente timbul. Sementara pelaku-pelakunya dapat menarik keuntungan, ekonomi secara keseluruhan dirugikan. Tentang ini Lihat James M. Buchanan, Robert D. Tollison dan Gordon Tullock (penyunting), "Toward A Theory of Rent-Seeking Society," *Texas A & M University Economic Series*, No. 4 (1980).

Merangkum diskusi tentang peluang investasi ini perlu dikemukakan hal-hal berikut. Di satu pihak ada semacam gejala investasi berlebihan di bidang-bidang tertentu yang dalam tahun 1970-an tidak tampak sebagai kejanggalan karena aliran dana yang besar dari luar negeri, baik yang berupa hasil ekspor maupun pinjaman luar negeri. Ketidakefisienan investasi-investasi ini dapat diselubungi oleh permintaan yang naik berkat aliran dana tersebut. Di lain pihak, di sektor-sektor tertentu terasa kekurangan investasi. Tidak banyak yang dikerjakan dalam industri karet, industri kopi, industri minyak sawit, industri rotan, industri perikanan atau industri lain yang berdasar atas bahan mentah yang tersedia di dalam negeri. Dengan kata lain, investasi yang secara kuat bertumpu pada pasar dalam negeri justru dalam banyak hal tidak sesuai dengan karunia faktor dalam negeri di samping menilailebihi daya serap pasar dalam negeri. Di sini perlu disebut salah satu biaya proteksi yang diberikan pada industri substitusi impor, yaitu kecenderungannya untuk menarik investasi ke sektor yang mendapat perlindungan tertinggi seperti industri otomotif. Proteksi tinggi yang diberikan pada substitusi impor justru mendorong investasi yang tidak sesuai dengan karunia faktor dan permintaan dalam negeri, seperti dikatakan oleh Haberger. Dengan kata lain, salah satu "basic need" pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini adalah penajaman prioritas tanpa harus berarti pengetatan perizinan. Urgensinya akan semakin tampak setelah uraian berikut tentang aspek pembelanjaan pembangunan.

Bagaimanapun lapisan pengusaha mengeluhkan keterbatasan peluang baru dalam bisnis, kiranya jelas bahwa peluang itu masih ada. Karena itu diskusi dapat dilanjutkan tentang aspek pembelanjaan investasi.

Dalam ekonomi terbuka seperti ekonomi Indonesia, ada dua unsur pembelanjaan yang perlu diperhatikan sekaligus, yaitu pembelanjaan domestik -- dalam kasus Indonesia pembelanjaan rupiah -- dan pembelanjaan devisa. Sepanjang menyangkut pembelanjaan rupiah, pertanyaan utama adalah mobilisasi. Rupiah masih tersedia berupa tabungan masyarakat dan "hoarding." Tetapi mobilisasinya ke dalam lingkaran perputaran ekonomi masih terbatas, walaupun sudah diupayakan melalui deregulasi perbankan, pengaktifan pasar modal dan lembaga keuangan para-fiskal seperti perusahaan asuransi. Walaupun pemerintah dapat dihadapkan pada penerimaan dalam negeri yang berkurang, kiranya yang lebih ketat di antara dua kendala ini adalah kendala devisa.

Pembelanjaan devisa dalam pembangunan ekonomi Indonesia selama ini adalah sangat tergantung dari hasil ekspor bahan mentah, terutama minyak bumi, dan impor modal jangka panjang berupa pinjaman luar negeri dan investasi asing. Tetapi sejak awal dasawarsa ini timbul perubahan-perubahan yang menjurus pada lingkungan yang semakin tidak menguntungkan dibanding tahun 1970-an.

Dalam pasar bahan mentah internasional tampak kontur-kontur yang tidak menguntungkan. Di satu pihak, penawaran mengalami ekspansi berkat: (i) kenaikan eksplorasi yang didorong oleh harga-harga tinggi selama tahun 1970-an; (ii) kemajuan teknologi bahan seperti teknologi bahan artifisial yang sudah memperkenalkan serat silikon dan rekayasa biologis yang berhasil menaikkan hasil rata-rata sebidang lahan tertentu; (iii) integrasi ekonomi-ekonomi sosialis dengan ekonomi dunia antara lain juga berarti kenaikan penawaran dalam pasar bahan mentah internasional. Di lain pihak, permintaan cenderung menurun karena berbagai perubahan. Pertama, ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa PDB negara-negara industri akan semakin kuat bersandar pada jasa-jasa dan ekonomi seperti ini barangkali akan semakin kurang padat bahan. Kedua, kemajuan teknologi produksi juga cenderung menurunkan kandungan bahan dari nilai tambah. Barangkali salah satu dorongan penting terhadap perkembangan ini lahir dari kenyataan bahwa Jepang sebagai negara yang "miskin" bahan dan sesuai itu sangat tertarik pada teknologi yang hemat bahan, kini telah menjadi penawar teknologi yang setaraf atau bahkan unggul dalam banyak hal dibanding Amerika Serikat. Ketiga, ekonomi-ekonomi yang merupakan pengimpor utama dari bahan mentah memang tumbuh lebih lambat dibanding tahun 1950-an dan 1960-an dan pertumbuhan lambat ini -- walaupun disertai oleh tingkat pengangguran yang tinggi -- sudah dianggap sebagai hal yang wajar. Dengan perkembangan-perkembangan ini, pasar bahan mentah internasional cenderung semakin tidak menguntungkan bagi pengekspor seperti Indonesia.

Mobilisasi devisa melalui ekspor hasil-hasil olahan dihadapkan pada kendala yang timbul karena kebijakan investasi selama tahun 1970-an. Industri yang tumbuh selama ini di Indonesia pada dasarnya adalah yang bersifat substitusi impor yang ditujukan untuk melayani permintaan dalam negeri. Sekali kapasitas suatu industri dianggap sudah mampu melayani produksi dalam negeri, industri yang bersangkutan cenderung diperlakukan sebagai "daerah terlarang" bagi pendatang baru, kecuali yang sepenuhnya bertujuan ekspor. Karena itu, penawaran yang tersedia bagi ekspor pada dasarnya adalah suatu residu, yaitu yang tidak dapat diserap oleh pasar dalam negeri. Tetapi itu pun mengalami kesulitan dalam persaingan internasional karena biaya tinggi yang sebagian berakar pada kelemahan-kelemahan intra-perusahaan seperti keterbelakangan teknologi, termasuk dalam manajemen, dan sebagian lagi bersumber dari kelemahan-kelemahan ekstra-perusahaan seperti biaya-biaya pengangkutan, termasuk jasa kepelabuhan.

Masalah-masalah dalam negeri yang sudah berat ini diperberat lagi oleh kecenderungan negara-negara industri maju yang diincar Indonesia sebagai pasar utama, untuk semakin menghalangi impor, terutama yang berupa barang-barang "sensitif" yang justru masih merupakan yang terpenting di an-

tara barang-barang ekspor Indonesia dalam kelompok hasil olahan. Tanda-tanda bahwa kecenderungan ini akan berbalik dalam jangka pendek belum tampak. Pembicaraan-pembicaraan tentang babak baru liberalisasi dalam rangka GATT masih ditandai oleh perbedaan tajam dalam prioritas agenda.

Prospek yang kurang menguntungkan seperti digambarkan di atas tidak berarti bahwa peluang kenaikan penerimaan devisa dari ekspor barang sama sekali tidak ada. Tetapi peluang-peluang itu, seperti diversifikasi barang-barang ekspor dan atau negara-negara tujuan ekspor, hanya dapat menjadi riil setelah didahului penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan investasi dan perdagangan. Padahal, produksi industri yang memang dirancang dengan pengumpulan tentang ketersediaan sejumlah devisa, memerlukan devisa. Karena itu, prospek impor modal perlu didiskusikan.

Laporan Bank Dunia 1985 menggambarkan bahwa prospek impor modal bagi negara berkembang seperti Indonesia memang tidak secerah seperti tahun 1970-an, tetapi dengan inovasi-inovasi diperkirakan bahwa penawaran masih tersedia.²⁵ Namun demikian, di sini pun dihadapi kendala-kendala, seperti perburukan dasar peminjaman, di samping keragu-raguan di dalam negeri tentang sejauh mana pinjaman luar negeri masih "patut" diperbesar. Pertanyaan ini kiranya perlu lebih banyak dihubungkan pada sejauh mana Indonesia dapat memperbaiki prestasi pertumbuhan dan ekspor di tahun-tahun mendatang daripada pada indikator statis seperti tingkat pelayanan pinjaman luar negeri, apakah itu sebagai persentase penerimaan ekspor atau sebagai persentase pendapatan nasional.

Pertanyaan lain yang akan dihadapi Indonesia dalam tahun-tahun mendatang menyangkut teknologi. Sementara tidak sedikit yang sudah menyebut teknologi sebagai faktor yang bahkan lebih penting daripada modal dan tenaga kerja, penanganannya dalam model pembangunan masih lebih banyak bersifat implisit daripada eksplisit. Di sini terletak salah satu kelemahan besar dari model-model pembangunan, yaitu ketidakberhasilannya mengukur input dan output teknologi secara eksplisit. Tetapi dengan kelemahan ini, peran teknologi dalam pembangunan pada umumnya dianggap sangat penting dalam model-model pembangunan. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang jenis teknologi yang diperlukan oleh ekonomi yang sedang berkembang, pada dasarnya tetap ada konsensus tentang perlunya kemajuan teknologi. Tetapi justru pertanyaan yang menyangkut prioritas pengembangan teknologi, adalah yang sangat penting dan sekaligus sangat pelik. Atas dasar apa dapat dikatakan bahwa pemerintah perlu menentukan prioritas dan memberi-

²⁵Lihat *World Development Report 1985* (The World Bank), yang dipusatkan pada sistem keuangan internasional.

kan fasilitas bagi teknologi tertentu? Tolok ukur apa yang dapat dipakai sebelum menyimpulkan bahwa prioritas perlu diberikan pada industri tertentu, apakah itu industri baja, industri kapal terbang, industri perkapalan, industri tekstil atau industri pertanian, sehingga ketidakefisienan industri yang bersangkutan dapat dibenarkan?

Tidak ada jawaban final atas pertanyaan ini, lebih-lebih dengan kecepatan keusangan teknologi seperti yang kita hadapi dewasa ini. Namun demikian adalah jelas, bahwa pengembangan teknologi harus sepadan dengan lingkungan ekonomi yang menurut perkiraan akan dihadapi. Itu antara lain berarti kesepadanan dengan karunia faktor, potensi penyebaran (difusi) atau eksternalitas teknologi yang bersangkutan ke luar wahana pengembangannya, dan biaya pengembangan teknologi yang bersangkutan. Atas dasar ini dapat dikatakan secara intuitif bahwa sektor yang relatif padat karya seperti industri tekstil, industri elektronik, industri alas kaki dan sektor yang relatif padat bahan seperti industri karet dan industri kosmetik, atau bahkan hanya komponen tertentu dari industri-industri ini, perlu diberi prioritas sebagai wahana pengembangan teknologi di Indonesia. Sebaliknya pemilihan industri-industri yang masih ditandai oleh kandungan impor yang tinggi seperti industri otomotif dan industri kapal terbang sebagai wahana pengembangan teknologi menjanjikan eksternalitas yang lebih terbatas. Paling sedikit untuk sementara, pemberian prioritas dengan segala fasilitas yang diboncengnya pada industri seperti ini sebagai wahana pengembangan teknologi akan berarti "subsidi impor" dalam arti penjualan barang yang pada dasarnya adalah barang impor didorong dengan bantuan subsidi yang didasarkan atas nilai tambah domestik yang kecil.

Seleksi teknologi hanya merupakan bagian kecil dari keseluruhan proses pengembangan teknologi. Salah satu pertanyaan yang juga penting menyangkut kelembagaan. Pada dasarnya setiap perusahaan dalam setiap industri adalah wahana pengembangan teknologi, meskipun hanya sebagian kecil di antaranya yang mendapat fasilitas dari pemerintah. Tetapi kalau masing-masing industri dilindungi terhadap pendatang baru seperti disinggung di depan, urgensi pengembangan teknologi akan dirasa lebih lemah daripada kalau industri yang bersangkutan terbuka terhadap pendatang-pendatang baru yang pilihan teknologinya tidak dibayangi oleh kepentingan untuk mempertahankan teknologi yang sudah ada. Dalam hubungan inilah perlu dipertanyakan sejauh mana perusahaan-perusahaan negara yang lebih kebal terhadap ketidakefisienan dan keterbelakangan teknologi dibanding perusahaan swasta dapat diandalkan sebagai pelopor pengembangan teknologi.

Masih banyak perubahan-perubahan lain dalam lingkungan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia dalam tahun-tahun mendatang yang menuntut

penyesuaian dalam kebijakan. Di samping itu, masih banyak pertanyaan lama yang belum dapat dijawab dan karena itu memerlukan pendekatan baru seperti desentralisasi pembangunan dan penertiban aparatur negara. Tetapi di lain pihak tidak boleh dilupakan bahwa kemajuan-kemajuan pun sudah dicapai dalam banyak bidang seperti pertanian pangan, walaupun kemajuan-kemajuan itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru yang juga sulit dijawab. Untuk dapat menghadapi lingkungan tersebut diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan ekonomi, yang untuk sebagian sudah disebut menyusul masing-masing uraian tentang lingkungan baru tersebut.

Tidak ada model yang dapat dijiplak secara utuh menghadapi lingkungan baru ini, terlebih dalam waktu ekonomi pembangunan berada dalam krisis, sementara paradigma baru seperti paradigma dependensi pada dasarnya belum melangkah lebih jauh dari diagnosa, kecuali kalau disosiasi dianggap sebagai terapi. Namun demikian, sebagian dari sifat-sifat model yang dicari kiranya dapat diturunkan dari uraian-uraian di depan.

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam tahun-tahun mendatang akan menarik lebih banyak untung dari keterbukaan dibanding kerugian yang akan diderita dari tertutupan. Sepintas lalu pernyataan ini tampak tidak relevan. Tetapi kalau dihubungkan dengan kampanye swasembada dan program-program yang dirumuskan untuk pencapaiannya, kiranya adalah beralasan untuk mengulangi perlunya keterbukaan. Semakin luas jangkauan swasembada, semakin relevan untuk mempertanyakannya dengan menarik pelajaran dari ekonomi-ekonomi tertutup di tempat lain atau di waktu-waktu silam. Mengatakan bahwa swasembada akan disertai oleh peningkatan ekspor, terlebih di dunia yang semakin keranjingan terhadap perdagangan barter, adalah ibarat bertepuk sebelah tangan.

Melalui keterbukaan, pembangunan ekonomi akan tetap tergantung dari ekonomi negara-negara lain, sebagaimana ekonomi Indonesia dengan keunggulan-keunggulannya sebagai pembeli dan atau penjual, akan turut mengkondisikan ekonomi negara-negara lain. Karena itu, yang harus dipertanyakan bukan keterbukaan itu sendiri, melainkan derajat ketergantungan yang memang dapat melunak atau menguat, tergantung dari sejauh mana Indonesia dapat mengenali dan mengembangkan bidang-bidang yang sepadan dengan keunggulan komparatif yang menurut dugaan dimiliki. "Pemberian prioritas" pada bidang-bidang ini dapat memperbesar keuntungan interdependensi dibanding dengan pembangunan yang tidak mengindahkan karunia faktor atau keunggulan komparatif. Bagaimanapun buruknya proteksionisme, keunggulan komparatif yang menyolok masih dapat diandalkan untuk memeranginya seperti dibuktikan oleh Jepang dan yang lebih maju di antara negara berkembang dewasa ini.

Di samping mempunyai dua sifat tersebut di atas, pembangunan ekonomi Indonesia dalam tahun-tahun mendatang akan memerlukan peran swasta yang lebih besar dan intervensi negara yang lebih kecil. Itu tidak hanya berarti bagian yang semakin besar dari investasi swasta dalam investasi total, tetapi juga peran yang semakin besar dalam pembuatan keputusan-keputusan yang menyangkut investasi, produksi dan distribusi. Untuk mendukung penyesuaian-penyesuaian kebijakan ekonomi makro yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal tahun 1982, masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian dalam kebijakan ekonomi mikro, demikian sehingga sumber yang semakin terbatas pergi ke bidang-bidang yang menjanjikan hasil tertinggi dan yang paling sesuai dengan karunia faktor Indonesia. Dengan demikian, skala prioritas ditentukan atas dasar hasil yang diharapkan dan ketersediaan faktor-faktor, dan bukan atas dasar perhitungan-perhitungan statis yang tidak lama kemudian berakhir pada keusangan struktural.

Mengatakan bahwa sektor swasta adalah malaikat, sementara birokrasi adalah iblis adalah sama salahnya dengan mengatakan yang sebaliknya. Lapisan pengusaha yang sudah mempunyai tradisi panjang pun masih dan akan terus mempunyai kelemahan, jangankan yang baru terbentuk seperti di Indonesia. Sektor swasta di Indonesia masih sangat tergantung dari sektor negara seperti tampak nyata dari ketidakmampuannya untuk menghindari kelesuan bisnis dalam paruh pertama 1980-an ini ketika pertumbuhan sektor negara melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun untuk sebagian ketidakmampuan ini disebabkan oleh pembatasan-pembatasan yang dikenakan oleh pemerintah. Yang diharapkan adalah bahwa melalui pengurangan regulasi, dalam sektor swasta itu sendiri akan timbul suatu seleksi yang menguntungkan pengusaha-pengusaha sejati (*genuine entrepreneurs*) yang akan bersaing mencapai prestasi ekonomik dan prestasi sosial yang terbaik. Namun demikian, penulis meragukan bahwa perbaikan citra sosial sektor swasta akan berlangsung dengan sendirinya, terlepas dari kasus-kasus kekecualian yang bahkan dapat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Robert Owen di Inggris dengan *the New Moral World*-nya.

Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sosial yang harus digumuli juga oleh sektor swasta seiring dengan perannya yang membesar dalam ekonomi. Salah satu yang terpenting di antaranya adalah tanggung jawab dalam pendidikan ketrampilan tenaga kerja yang hanya untuk sebagian dapat dipikul pemerintah. Keberhasilan serikat-serikat pengusaha, apakah itu KADIN atau asosiasi-asosiasi, akan semakin diukur menurut apa yang dapat mereka berikan dalam pendidikan ketrampilan di Indonesia. Selama ini sektor swasta cenderung menolak tanggung jawab ini dengan alasan bahwa di antara pengusaha ada saja yang menjadi penunggang bebas (*free rider*) dalam arti mencicipi nikmat pendidikan ketrampilan tanpa menanggung biaya melalui "pembajakan"

tenaga kerja. Tetapi pertanyaan semacam ini justru harus dijawab oleh asosiasi dan tidak dipakai sebagai alasan untuk menolak tanggung jawab. Atas dasar program-program yang sudah dimulai dalam bidang-bidang tertentu kiranya suatu program pendidikan ketrampilan yang "terpadu" dapat diupayakan sebagai program tripartite antara sektor swasta, buruh sendiri dan pemerintah.

Masih banyak pertanyaan sosial lain seperti lingkungan kerja, jam kerja dan jaminan sosial yang secara bertahap kiranya harus digumuli oleh sektor swasta Indonesia bersama-sama dengan buruh dan pemerintah. Suatu konsensus sosial adalah bagian dari lingkungan yang diperlukan oleh sektor swasta untuk memperbaiki produktivitas sebagai sumber terpenting dari pertumbuhan ekonomi.

PENUTUP

Dikatakan secara verbal, model pembangunan ekonomi Indonesia untuk tahun-tahun mendatang memerlukan apa yang disebut oleh Paul Streeten sebagai "keterbukaan yang diskriminatif." Dalam model itu secara realistis harus diperhitungkan bahwa pembangunan akan tetap tergantung dari ekonomi-ekonomi lain. Ketergantungan ini akan lebih menguntungkan kalau melalui diversifikasi Indonesia berhasil memperkuat keunggulan komparatifnya dalam bidang-bidang yang lebih sepadan dengan karunia faktornya, daripada kalau sejenis swasembada diusahakan dalam liputan sektoral yang semakin luas. Untuk itu, yang diperlukan bukan regulasi-regulasi baru, melainkan pelonggarannya yang akan mendorong pembentukan sektor swasta yang semakin mandiri atau semakin tidak tergantung dari privelese-privelese yang berasal dari pemerintah. Tetapi afirmasi sosial-politis dari sektor swasta seperti itu akan tergantung dari sejauh mana sektor swasta bersedia mengemban tanggung jawab sosial-politis yang sepadan dengan pertumbuhannya.